



Modul Politik dan Pemerintahan Amerika Utara

**Disusun Oleh:
Dini Tiara Sasmu, S.IP., M.Si., M.A.**





DAFTAR ISI

COVER DAN PENYUSUN	i
DAFTAR ISI	ii
PENDAHULUAN	iv
1. Identitas Modul.....	iv
2. Deskripsi Singkat Materi	iv
3. Petunjuk Penggunaan Modul	vi
4. Materi Pembelajaran	vi
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 1	1
1.1 TUJUAN PEMBELAJARAN	1
1.2 URAIAN MATERI	1
1.2.1 Ulasan Singkat Tentang Politik dan Pemerintahan Amerika Utara	1
1.2.2 Relevansi Kajian Amerika Utara dalam Konteks Global dan Nasional.....	3
1.3 RANGKUMAN	3
1.4 REFERENSI.....	4
1.5 Latihan Soal.....	4
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 2.....	6
2.1 TUJUAN PEMBELAJARAN	6
2.2 URAIAN MATERI	6
2.2.1. Politik dan Pemerintahan Amerika Serikat.....	6
2.2.2.Lembaga-Lembaga Pemerintahan di Amerika Serikat	8
2.2.3. Proses Pembuatan Kebijakan di Amerika Serikat.....	10
2.3 RANGKUMAN	12
2.4 REFERENSI.....	12
2.5 Latihan Soal.....	12
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 3.....	16
3.1 TUJUAN PEMBELAJARAN	16
3.2 URAIAN MATERI	16
3.2.1. Politik dan Pemerintahan Kanada	16





3.2.2. Politik dan Pemerintahan Meksiko.....	17
3.3 RANGKUMAN	18
3.4 REFERENSI.....	18
3.5 Latihan Soal.....	19
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 4.....	22
4.1 TUJUAN PEMBELAJARAN	22
4.2 URAIAN MATERI	22
4.2.1 Konflik Perbatasan Amerika Utara	22
4.2.2 Pemerintahan Regionalisme Kawasan Amerika Utara	23
4.3 RANGKUMAN.....	24
4.4 REFERENSI.....	24
4.5 Latihan Soal.....	25
AKTIVITAS PEMBELAJARAN 5	27
5.1 TUJUAN PEMBELAJARAN	27
5.2 URAIAN MATERI	27
5.2.1 Pemerintahan Regional Pasca NAFTA di Kawasan Amerika Utara	27
5.3 RANGKUMAN.....	29
5.4 REFERENSI.....	29
5.5 Latihan Soal.....	29





PENDAHULUAN

1. Identitas Modul

Mata Pelajaran : Politik dan Pemerintahan Amerika Utara
Tujuan : Mahasiswa Semester
Judul : Politik dan Dinamika Kawasan Amerika Utara: Kajian Komparatif Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.

2. Deskripsi Singkat Materi

Modul *Politik dan Pemerintahan Amerika Utara* merupakan bahan ajar yang dirancang untuk mengkaji secara komprehensif dinamika hubungan politik, ekonomi, sosial, dan budaya antara tiga negara utama di kawasan ini, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ketiga negara ini, meskipun saling berbatasan secara geografis dan terhubung dalam berbagai perjanjian regional, memiliki sejarah politik yang berbeda, struktur pemerintahan yang khas, serta kebijakan domestik dan internasional yang dipengaruhi oleh identitas nasional dan kepentingan geopolitik masing-masing.

Modul ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh dan mendalam kepada mahasiswa mengenai bagaimana sistem politik di Amerika Utara berfungsi dalam konteks kerja sama regional, namun juga dalam ketegangan dan tantangan global seperti perubahan iklim, krisis migrasi, disrupsi perdagangan, dan geopolitik energi. Dengan pendekatan komparatif, modul ini mendorong mahasiswa untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta interaksi kebijakan lintas negara dalam sistem federalisme Amerika Serikat, model parlementer Kanada, dan transisi demokrasi Meksiko.

Materi dalam modul ini mencakup pembahasan mengenai masyarakat dan politik kelompok pribumi (*Indigenous*) yang memiliki kedudukan khusus dalam ketiga negara, serta tantangan mereka dalam memperoleh pengakuan hukum dan representasi politik yang setara. Topik seperti kebijakan perdagangan lintas negara pasca-NAFTA dan transformasinya menjadi USMCA, pengelolaan keamanan perbatasan, serta isu-isu lingkungan seperti pengelolaan hutan, emisi karbon, dan kerjasama energi terbarukan, dibahas untuk menunjukkan bagaimana kerja sama regional dibentuk dan diuji dalam praktik.





Modul ini juga menelaah peran aktor politik, seperti partai politik, lembaga legislatif dan eksekutif, kelompok kepentingan, komunitas bisnis, organisasi masyarakat sipil, serta media massa, dalam membentuk lanskap kebijakan dan opini publik. Mahasiswa akan diajak memahami bagaimana strategi kampanye, pembentukan koalisi, serta mekanisme lobi dan tekanan politik berbeda antarnegara namun saling berpengaruh dalam pengambilan keputusan lintas batas.

Modul ini disusun dengan mengacu pada sumber-sumber akademik terbaru, termasuk artikel ilmiah, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan dan perjanjian internasional seperti NAFTA (1994), USMCA (2020), dan perjanjian bilateral lainnya. Data empiris dari lembaga resmi seperti OECD, World Bank, dan *Pew Research Center*, serta data statistik dari pemerintah masing-masing negara digunakan untuk memberikan konteks yang aktual dan berbasis bukti (*evidence-based*).

Modul ini ditujukan bagi mahasiswa, peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, dan kalangan profesional yang ingin memahami dinamika politik kawasan Amerika Utara secara komparatif, kritis, dan reflektif. Dalam dunia yang semakin saling terhubung, pemahaman terhadap kawasan ini menjadi kunci untuk menjelaskan kecenderungan politik global, arah kebijakan luar negeri AS, dan posisi Kanada dan Meksiko dalam sistem internasional.

Dilengkapi dengan studi kasus aktual, seperti *kebijakan imigrasi pasca-Trump*, *penanganan pandemi COVID-19 di perbatasan AS-Meksiko*, serta *konflik pipeline energi di Kanada*, modul ini juga menyajikan materi bacaan, soal latihan, kuis, dan referensi ilmiah yang membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, keterampilan analitis, dan kapasitas evaluatif dalam menilai kebijakan dan institusi politik. Mahasiswa juga akan dilatih untuk melihat keterkaitan antara politik domestik dan dinamika regional, serta memahami bagaimana kebijakan suatu negara dapat berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap tetangganya dan bahkan secara global.

Dengan pendekatan multidisipliner dan berbasis studi kawasan, modul ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang strategis bagi generasi akademik yang ingin memahami dan terlibat lebih jauh dalam kajian politik global kontemporer, khususnya dalam konteks Amerika Utara sebagai aktor utama dunia.





3. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mempermudah dan membantu kalian dalam mempelajari dan memahami isi modul Politik dan Pemerintahan Amerika Utara, berikut ini beberapa petunjuk yang dapat kalian ikuti:

1. Bacalah modul ini secara menyeluruh. Modul ini terdiri dari beberapa kegiatan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk membantu kalian memahami hubungan politik, ekonomi, dan sosial di kawasan Amerika Utara.
2. Upayakan untuk memahami setiap topik melalui diskusi aktif, baik dengan teman sejawat maupun dengan dosen pengampu. Diskusi akan membantu memperdalam pemahaman terhadap perbandingan sistem politik dan isu-isu kontemporer yang dibahas.
3. Kerjakan latihan soal, kuis, atau tugas reflektif yang tersedia secara sungguh-sungguh. Ini akan membantu kalian mengukur pencapaian kompetensi dan memperkuat pemahaman materi secara mandiri.
4. Setelah mempelajari modul ini, kalian akan memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem pemerintahan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, serta dinamika hubungan regional pasca-NAFTA dan USMCA.
5. Diharapkan kalian dapat mengembangkan sikap kritis, analitis, dan terbuka terhadap kompleksitas politik global, serta menghargai keberagaman sistem dan pendekatan dalam tata kelola pemerintahan di tingkat internasional.

4. Materi Pembelajaran

Modul ini terdiri dari beberapa bab yang mencakup materi-materi berikut:

1. Aktivitas Pembelajaran 1: Pengantar Politik dan Pemerintahan di Kawasan Amerika Utara.
2. Aktivitas Pembelajaran 2: Dinamika Politik dan Pemerintahan di Amerika Serikat.
3. Aktivitas Pembelajaran 3: Sistem Politik dan Pemerintahan di Kanada dan Meksiko.
4. Aktivitas Pembelajaran 4: Konflik Perbatasan dan Pemerintahan Regionalisme di Kawasan Amerika Utara.
5. Aktivitas Pembelajaran 5: Pemerintahan Regional Pasca NAFTA di Kawasan Amerika Utara.





AKTIVITAS PEMBELAJARAN 1

1.1 TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran aktivitas pembelajaran 1 terkait Pengantar Politik dan Pemerintahan di Kawasan Amerika Utara, adalah sebagai berikut:

1. Memahami Dinamika Politik Amerika Utara: Mahasiswa dapat menjelaskan proses integrasi politik regional di Amerika Utara, khususnya perkembangan dan tantangan yang muncul sejak perjanjian NAFTA.
2. Menganalisis Sistem Politik dan Pemerintahan: Mahasiswa mampu membandingkan sistem politik, struktur pemerintahan, serta kebijakan domestik dan luar negeri di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
3. Mengevaluasi Peran Aktor Politik: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan mengevaluasi peran lembaga pemerintahan, partai politik, kelompok kepentingan, serta media dalam proses politik di Amerika Utara.
4. Mengkritisi Kebijakan Publik dan Hubungan Internasional: Mahasiswa dapat menganalisis kebijakan publik di bidang ekonomi, sosial, dan keamanan di setiap negara Amerika Utara serta bagaimana kebijakan tersebut mempengaruhi hubungan internasional dan regional.
5. Menganalisis Tata Kelola Regional Pasca-NAFTA: Mahasiswa mampu menilai perubahan dalam tata kelola keamanan perbatasan, regionalisme, serta sistem arbitrase perdagangan dan investasi di Amerika Utara setelah NAFTA.

1.2 URAIAN MATERI

1.2.1 Ulasan Singkat Tentang Politik dan Pemerintahan Amerika Utara

Mata kuliah Politik dan Pemerintahan Amerika Utara dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai dinamika hubungan antara tiga negara utama di kawasan ini, yaitu Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Kawasan Amerika Utara bukan hanya memiliki kepentingan strategis dalam bidang ekonomi dan perdagangan global, tetapi juga menunjukkan keragaman dalam sistem politik, struktur pemerintahan, identitas budaya, serta arah kebijakan domestik dan luar negeri.





Melalui mata kuliah ini, mahasiswa diajak untuk menganalisis interaksi lintas negara yang bersifat politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang secara kolektif membentuk identitas kawasan. Pembahasan dimulai dari aspek historis pembentukan negara modern hingga ke isu-isu kontemporer seperti perdagangan internasional, perubahan iklim, isu migrasi dan perbatasan, keamanan nasional, politik energi, serta hak-hak masyarakat Indigenous (pribumi) yang masih menjadi bagian dari perdebatan politik domestik maupun internasional.

Salah satu fokus utama dalam mata kuliah ini adalah dinamika integrasi politik dan ekonomi regional yang dimulai sejak terbentuknya *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) pada tahun 1994, yang kemudian digantikan oleh *United States-Mexico-Canada Agreement* (USMCA) pada tahun 2020. Meskipun NAFTA sempat dianggap sebagai tonggak awal pembentukan kawasan regional yang terintegrasi, kenyataannya proyek ini tidak berkembang seperti yang diharapkan. Banyak kalangan akademisi menilai bahwa gagalnya model NAFTA dalam membangun kerangka integrasi regional yang stabil disebabkan oleh pendekatan yang terlalu meniru model Uni Eropa, tanpa mempertimbangkan konteks politik dan sejarah khas Amerika Utara.

Kajian tentang regionalisme di Amerika Utara juga membuka ruang perdebatan teoritis. Munculnya konsep seperti “*new regionalism*,” “*soft institutionalism*,” dan “*multilevel governance*” menjadi alternatif untuk memahami fenomena integrasi yang lebih fleksibel dan pragmatis, terutama di wilayah yang tidak memiliki struktur kelembagaan formal seperti Uni Eropa. Namun, penerapan konsep-konsep ini dalam konteks Amerika Utara masih terbatas, dan belum sepenuhnya menjawab kompleksitas hubungan antarnegara yang ditandai oleh asimetrinya kekuasaan (khususnya dominasi Amerika Serikat), serta perbedaan prioritas nasional antara Kanada dan Meksiko.

Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya akan mendapatkan wawasan teoritis dan empirik, tetapi juga diajak untuk mengembangkan perspektif kritis dan komparatif dalam melihat model-model kerja sama kawasan. Pemahaman tentang regionalisme Amerika Utara akan membantu mahasiswa memahami tantangan-tantangan yang dihadapi dalam membangun koordinasi kebijakan lintas negara, terutama dalam menghadapi isu global seperti perubahan iklim, krisis energi, keamanan siber, dan disrupsi ekonomi akibat pandemi maupun ketegangan geopolitik global.





1.2.2 Relevansi Kajian Amerika Utara dalam Konteks Global dan Nasional

Studi tentang Amerika Utara menjadi semakin relevan di tengah perubahan tatanan global yang ditandai oleh munculnya kekuatan-kekuatan baru, ketegangan geopolitik, serta krisis multidimensi yang memerlukan kerja sama lintas negara. Amerika Utara—dengan posisinya sebagai kawasan dengan GDP tertinggi secara agregat, pusat inovasi teknologi, dan aktor dominan dalam lembaga internasional—memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas global.

Bagi Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, memahami politik dan pemerintahan Amerika Utara memberikan banyak manfaat strategis. Pertama, karena Amerika Serikat merupakan mitra dagang utama dan kekuatan militer global, arah kebijakan luar negeri dan ekonomi domestik AS akan selalu berdampak pada kawasan Indo-Pasifik. Kedua, model tata kelola Kanada dan program pluralisme budaya serta rekonsiliasi dengan masyarakat adat menjadi contoh praktik pemerintahan inklusif yang bisa dipelajari. Ketiga, pengalaman Meksiko dalam menghadapi tantangan demokratisasi, pengelolaan perbatasan, serta ketimpangan sosial menjadi cermin yang dapat diambil pelajaran dalam konteks negara berkembang.

Selain itu, mahasiswa akan dibekali dengan kemampuan untuk menganalisis kebijakan luar negeri AS dan Kanada terhadap negara-negara Global South, serta memahami dinamika migrasi, populisme, dan nasionalisme yang memengaruhi proses politik di kawasan tersebut. Kajian ini juga dapat memperluas wawasan mahasiswa dalam melihat hubungan antara struktur kekuasaan domestik dan pengaruh globalisasi terhadap arah kebijakan publik.

Dengan demikian, mata kuliah ini tidak hanya berfungsi sebagai kajian kawasan, tetapi juga sebagai laboratorium politik global di mana teori dan praktik hubungan internasional, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan dapat dianalisis secara konkret dan relevan.

1.3 RANGKUMAN

1. Dalam pengalaman kawasan Amerika Utara, para elit politik cenderung lebih menyukai penggunaan jejaring informal dalam membangun kerja sama dan komunikasi regional dibandingkan pendekatan yang sepenuhnya formal dan institusional.





2. Meskipun jejaring informal berkembang, hambatan kelembagaan dan tekanan dari opini publik tetap menjadi kendala utama dalam implementasi kerja sama regional yang lebih terintegrasi di kawasan ini.
3. Masa depan tata kelola regional di Amerika Utara masih terbuka untuk kemungkinan kerja sama yang diperbarui, terutama jika terdapat kesamaan kepentingan antarnegara dan dorongan dari dinamika geopolitik baru.
4. Tren ekonomi global yang terus berkembang dan saling memengaruhi antarwilayah turut memengaruhi arah dan bentuk kerja sama regional Amerika Utara ke depan, baik dalam bidang perdagangan, lingkungan, maupun keamanan lintas batas.

1.4 REFERENSI

Bow, B., & Anderson, G. (2014). Building without architecture: Regional governance in post-NAFTA North America. In *Regional Governance in Post-NAFTA North America* (pp. 1-30). Routledge.

1.5 Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

(Pilih jawaban yang paling tepat)

1. Apa salah satu faktor utama yang menyebabkan menurunnya momentum kerja sama regional pasca-NAFTA?
 - a. Penguatan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa
 - b. Kegagalan diplomasi Kanada
 - c. Meningkatnya gerakan anti-globalisasi domestik
 - d. Keterlibatan militer Meksiko di luar negeri
2. Model kerja sama yang lebih disukai oleh Amerika Serikat dalam hubungan regional adalah:
 - a. Trilateral berbasis parlemen
 - b. Hub-and-spokes (poros dan jari-jari)
 - c. Integrasi penuh seperti Uni Eropa
 - d. Model konsensus ASEAN





3. Apa yang menjadi ciri utama dari pendekatan *soft law* di kawasan Amerika Utara?
 - a. Didasarkan pada ratifikasi konstitusional
 - b. Dilaksanakan secara militer
 - c. Menghindari pengawasan kongres
 - d. Mengandalkan keputusan Mahkamah Agung
4. Salah satu inisiatif bilateral utama antara Amerika Serikat dan Kanada pasca-NAFTA adalah:
 - a. HLRCC
 - b. T-MEC
 - c. Beyond the Border (BTB)
 - d. NAFTA 2.0
5. Apa yang menjadi kekhawatiran utama Kanada dan Meksiko dalam kerja sama regional dengan Amerika Serikat?
 - a. Ketimpangan hak suara di PBB
 - b. Keterbatasan teknologi pertahanan
 - c. Kehilangan kedaulatan nasional
 - d. Ketergantungan pada ekspor energi

B. Pertanyaan Esai

(Jawab secara singkat dan padat)

1. Jelaskan bagaimana peran *CUSFTA* dan *NAFTA* menjadi pengecualian dalam pola hubungan regional di Amerika Utara!
2. Mengapa Amerika Serikat lebih memilih pendekatan bilateral dalam kerja sama regional dibandingkan pendekatan trilateral?
3. Bagaimana perubahan ekonomi global, seperti kebangkitan Tiongkok dan krisis Jepang, memengaruhi dinamika kerja sama di kawasan Amerika Utara?
4. Jelaskan mengapa *soft law* dan jejaring informal menjadi preferensi elit politik dalam tata kelola regional Amerika Utara!
5. Bagaimana persepsi publik terhadap integrasi regional di Amerika Utara memengaruhi keberlanjutan kerja sama antarnegara?





AKTIVITAS PEMBELAJARAN 2

2.1 TUJUAN PEMBELAJARAN

Tujuan pembelajaran aktivitas pembelajaran 2 terkait Sistem Politik dan Pemerintahan di Amerika Serikat, adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa memahami Politik Pemerintahan Amerika Serikat.
2. Mahasiswa memahami Sistem Pemerintahan Baru, Federalisme, Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Sipil
3. Mahasiswa memahami apa itu Opini Publik, Sosialisasi Politik dan Media, Kelompok Kepentingan dan Partai Politik.
4. Mahasiswa memahami Kampanye dan Pemilihan Umum di Amerika Serikat
5. Mahasiswa dapat menjelaskan Lembaga-Lembaga Pemerintahan Amerika Serikat seperti Kongres, Presiden, Cabang Eksekutif dan Lembaga Peradilan di Amerika Serikat.
6. Mahasiswa dapat menjelaskan proses Pembuatan Kebijakan seperti Kebijakan Domestik dan Ekonomi serta Kebijakan Luar Negeri di Amerika Serikat

2.2 URAIAN MATERI

2.2.1 Sistem Politik di Amerika Serikat

Sistem politik di Amerika Serikat berbentuk demokrasi liberal konstitusional yang berakar pada nilai-nilai kebebasan individu, supremasi hukum, dan kedaulatan rakyat. Sistem ini didasarkan pada Konstitusi Federal yang diberlakukan sejak terbentuknya Pemerintahan Baru (New Government) pada tahun 1789. Konstitusi tersebut tidak hanya mengatur pembagian kekuasaan secara institusional, tetapi juga menjamin hak-hak dasar individu yang tercantum dalam *Bill of Rights* (Sepuluh Amandemen Pertama).

Ciri utama dari sistem politik Amerika Serikat adalah pemisahan kekuasaan (separation of powers) antara tiga cabang pemerintahan—legislatif, eksekutif, dan yudikatif—serta sistem checks and balances yang memungkinkan setiap cabang mengawasi dan mengimbangi cabang lainnya. Selain itu, Amerika Serikat menganut prinsip federalisme, yaitu pembagian kewenangan antara pemerintah pusat (federal) dan pemerintah negara bagian. Negara bagian memiliki otonomi





tertentu, termasuk dalam menetapkan hukum, mengatur sistem pendidikan, dan pajak lokal, selama tidak bertentangan dengan Konstitusi Federal.

Sistem ini juga menjamin kebebasan sipil dan hak-hak sipil warga negara, seperti kebebasan beragama, kebebasan berbicara, hak atas pengadilan yang adil, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Prinsip-prinsip ini menjadikan AS sebagai salah satu model demokrasi liberal yang menjadi rujukan di berbagai negara.

Selain itu, mahasiswa akan diajak untuk memahami unsur-unsur penting dalam dinamika politik Amerika Serikat, antara lain:

1. Opini Publik dan Pengaruhnya terhadap Kebijakan

Opini publik memiliki peran sentral dalam sistem demokrasi AS. Dalam banyak kasus, kebijakan pemerintah dirumuskan atau diubah berdasarkan tekanan dari masyarakat melalui survei, demonstrasi, kampanye media, maupun petisi. Opini publik juga menjadi alat ukur dalam setiap proses politik, termasuk dalam pemilihan umum. Di Amerika Serikat, lembaga-lembaga survei memainkan peran strategis dalam membentuk narasi politik dan memberikan umpan balik langsung kepada pengambil kebijakan.

2. Sosialisasi Politik dan Peran Media

Nilai-nilai politik tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ditanamkan sejak usia dini melalui proses sosialisasi politik. Keluarga, sekolah, agama, dan media massa menjadi agen utama dalam proses ini. Di era digital, media sosial seperti Twitter/X, Facebook, dan YouTube menjadi arena baru pembentukan opini politik dan penyebaran informasi (atau disinformasi). Media memiliki peran ganda: sebagai sumber informasi politik dan sebagai aktor politik itu sendiri, yang dapat memengaruhi agenda publik dan persepsi terhadap kebijakan.

3. Kelompok Kepentingan dan Partai Politik

Kelompok kepentingan (*interest groups*) seperti asosiasi industri, serikat buruh, kelompok lingkungan, atau organisasi keagamaan, memiliki pengaruh besar dalam pembuatan kebijakan. Mereka sering melakukan lobi terhadap anggota Kongres atau Presiden untuk memperjuangkan agenda mereka. Partai politik, terutama dua partai utama—Partai Demokrat dan Partai Republik—berperan dalam menyusun platform kebijakan, merekrut kandidat, dan mengorganisasi suara pemilih. Partai juga menjadi kendaraan utama dalam artikulasi kepentingan publik dan pembentukan pemerintahan.





4. Kampanye dan Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Amerika Serikat merupakan elemen penting dari demokrasi elektoral yang kompetitif. Kampanye politik dilakukan secara terbuka, dan kandidat harus menggalang dana, dukungan media, serta membangun basis pemilih secara sistematis. Sistem elektoral Amerika juga unik karena menggunakan *Electoral College* dalam pemilihan presiden. Selain itu, pemilihan anggota Kongres, gubernur negara bagian, dan pejabat lokal dilakukan secara berkala dengan tingkat partisipasi dan kompetisi yang tinggi.

Pemilihan umum juga mencerminkan dinamika politik identitas, mobilisasi kelompok minoritas, serta perdebatan ideologis antara liberalisme, konservatisme, dan libertarianisme. Isu-isu seperti hak atas aborsi, pengendalian senjata, perubahan iklim, dan imigrasi sering kali menjadi pusat perdebatan dalam kampanye dan memengaruhi preferensi pemilih.

Melalui pemahaman terhadap unsur-unsur ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kekuatan dan tantangan dalam sistem politik Amerika Serikat serta merefleksikan relevansinya dalam konteks politik global dan nasional. Sistem politik AS bukan hanya sistem normatif, tetapi juga produk sejarah, budaya politik, dan adaptasi terhadap perubahan zaman.

2.2.2 Lembaga-Lembaga Pemerintahan di Amerika Serikat

Pemerintahan Amerika Serikat dibentuk berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan sistem *checks and balances*, yang berarti bahwa tidak ada satu lembaga pun yang memiliki kekuasaan absolut. Ketiga cabang pemerintahan memiliki fungsi yang setara namun saling mengawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi konstitusional Amerika Serikat dan telah menjadi model bagi banyak negara lain.

a. Kongres (Legislatif)

Kongres Amerika Serikat merupakan lembaga legislatif yang berfungsi untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Kongres terdiri dari dua kamar:

- Senat, yang mewakili negara bagian secara setara (masing-masing negara bagian memiliki dua senator, total 100 senator), dan





- Dewan Perwakilan (*House of Representatives*), yang mewakili rakyat berdasarkan jumlah penduduk dari tiap negara bagian (total 435 anggota).

Fungsi utama Kongres meliputi penyusunan undang-undang, menyetujui anggaran belanja negara, menyetujui perjanjian internasional (oleh Senat), dan memberikan pengawasan terhadap cabang eksekutif. Kongres juga memiliki wewenang untuk melakukan pemakzulan (*impeachment*) terhadap Presiden atau pejabat tinggi lainnya jika terbukti melanggar hukum atau etika.

b. Presiden (Eksekutif Utama)

Presiden Amerika Serikat menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, serta memiliki posisi sentral dalam sistem presidensial. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui sistem elektoral dan memegang jabatan selama empat tahun, dengan kemungkinan dipilih kembali satu kali.

Sebagai pemimpin cabang eksekutif, Presiden bertugas menjalankan undang-undang, mengusulkan kebijakan nasional, memimpin angkatan bersenjata sebagai *Commander-in-Chief*, serta menjalankan fungsi diplomasi dan hubungan luar negeri. Presiden juga memiliki kewenangan untuk mengeluarkan *Executive Orders* dan menunjuk pejabat-pejabat tinggi seperti menteri, duta besar, serta hakim agung—meskipun semua penunjukan ini harus melalui persetujuan Senat.

c. Cabang Eksekutif (Administrasi dan Birokrasi)

Cabang eksekutif tidak hanya mencakup Presiden, tetapi juga seluruh jaringan departemen, badan, dan lembaga federal yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. Beberapa departemen utama antara lain:

- *Department of State* (Departemen Luar Negeri)
- *Department of Defense* (Departemen Pertahanan)
- *Department of Education* (Departemen Pendidikan)
- *Department of Homeland Security* (Keamanan Dalam Negeri)

Birokrasi federal berperan penting dalam implementasi kebijakan publik, pelaksanaan program kesejahteraan sosial, regulasi ekonomi, serta pelayanan publik. Fungsi administratif ini dilakukan secara profesional dan permanen, di luar siklus politik elektoral.





d. Lembaga Peradilan (Yudikatif)

Cabang yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan konstitusi dan menegakkan hukum. Lembaga peradilan tertinggi adalah Mahkamah Agung (*Supreme Court*), yang terdiri dari sembilan hakim yang diangkat seumur hidup oleh Presiden, dengan persetujuan Senat.

Mahkamah Agung memiliki wewenang *judicial review*, yaitu menilai konstitusionalitas suatu undang-undang atau kebijakan. Jika Mahkamah menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka undang-undang tersebut batal demi hukum. Selain Mahkamah Agung, sistem peradilan federal juga mencakup pengadilan banding (*Courts of Appeals*) dan pengadilan distrik (*District Courts*). Lembaga peradilan memainkan peran penting dalam melindungi hak-hak sipil, menyeimbangkan kekuasaan antar cabang pemerintahan, serta menjaga supremasi konstitusi.

Secara keseluruhan, struktur pemerintahan Amerika Serikat didesain agar kekuasaan terbagi secara adil dan setiap cabang memiliki mekanisme untuk saling mengontrol. Misalnya, Kongres dapat menolak pengesahan anggaran Presiden, Mahkamah Agung dapat membatalkan kebijakan eksekutif yang inkonstitusional, dan Presiden dapat memveto undang-undang yang disahkan Kongres. Sistem ini telah terbukti mampu menjaga stabilitas politik dan menjadi ciri khas demokrasi liberal Amerika.

2.2.3 Proses Pembuatan Kebijakan di Amerika Serikat

Proses pembuatan kebijakan di Amerika Serikat mencerminkan kompleksitas sistem pemerintahan demokratis yang menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan sistem pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*). Proses ini melibatkan berbagai lembaga dan aktor politik yang memiliki peran serta kepentingan berbeda, baik dalam ranah domestik maupun luar negeri.

Secara umum, kebijakan di Amerika Serikat terbagi ke dalam dua ranah utama, yaitu:

a. Kebijakan Domestik dan Ekonomi

Kebijakan domestik mencakup berbagai isu penting yang secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, pajak, asuransi sosial, dan regulasi pasar. Contohnya adalah reformasi sistem kesehatan seperti *Affordable Care Act* (ObamaCare), kebijakan subsidi pendidikan tinggi, serta peraturan mengenai pajak penghasilan dan insentif bisnis.





Pembuatan kebijakan domestik dimulai dari penyusunan rancangan undang-undang oleh anggota Kongres atau usulan kebijakan dari Presiden. Selanjutnya, rancangan tersebut dibahas dalam berbagai komite legislatif, baik di Dewan Perwakilan maupun di Senat. Debat yang berlangsung dalam proses ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sangat politis, karena melibatkan perbedaan ideologi antara partai Demokrat dan Republik, serta tekanan dari kelompok kepentingan (lobbyists) dan respons masyarakat melalui opini publik.

b. Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional

Kebijakan luar negeri Amerika Serikat berkaitan dengan hubungan internasional, perjanjian dagang, aliansi militer, dan strategi pertahanan. Sebagai contoh, keterlibatan AS dalam NATO, perjanjian dagang seperti USMCA (pengganti NAFTA), serta pendekatan terhadap negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, dan Iran. Dalam kebijakan luar negeri, Presiden memiliki peran yang lebih dominan sebagai *Commander in Chief* dan kepala negara yang mewakili AS dalam forum internasional.

Namun, kendati Presiden memiliki ruang manuver yang lebih besar, Kongres tetap memiliki fungsi pengawasan, terutama dalam hal pendanaan militer, ratifikasi perjanjian internasional, dan otorisasi penggunaan kekuatan militer. Di sisi lain, lembaga-lembaga federal seperti Departemen Luar Negeri, Pentagon, CIA, dan lembaga think tank turut berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri.

Proses legislasi di Amerika Serikat tidak hanya bersifat vertikal (antara Presiden dan Kongres), tetapi juga horizontal dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Kelompok kepentingan seperti organisasi pengusaha, serikat buruh, kelompok advokasi lingkungan, serta media massa dan jajak pendapat publik (*polling*) memainkan peran besar dalam memengaruhi arah kebijakan.

Proses ini juga menghadapi tantangan yang dinamis, seperti polarisasi politik, gridlock legislatif, serta meningkatnya penggunaan eksekutif order (perintah eksekutif) oleh Presiden untuk mengesahkan kebijakan tanpa melalui persetujuan Kongres. Hal ini menunjukkan bahwa sistem politik Amerika, meskipun memiliki kerangka institusional yang kuat, tetap sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik praktis, dinamika elektoral, dan tekanan dari aktor non-negara.

Dengan memahami proses pembuatan kebijakan di Amerika Serikat, mahasiswa dapat melihat bagaimana sistem demokrasi bekerja dalam praktik, serta bagaimana kebijakan publik





dihasilkan melalui interaksi antara lembaga negara, aktor politik, dan partisipasi masyarakat dalam konteks negara federal yang kompleks dan pluralistik.

2.3 RANGKUMAN

1. Sistem politik Amerika Serikat berbentuk republik demokratis yang berdasarkan pada konstitusi federal. Sistem ini menjunjung tinggi prinsip pemisahan kekuasaan, federalisme, serta perlindungan terhadap kebebasan sipil dan hak-hak sipil.
2. Dalam sistem politik Amerika Serikat, opini publik, sosialisasi politik, media massa, kelompok kepentingan, partai politik, serta proses kampanye dan pemilu memainkan peran penting dalam pembentukan kebijakan dan dinamika demokrasi.
3. Struktur pemerintahan Amerika Serikat terdiri dari tiga cabang kekuasaan utama: legislatif (Kongres), eksekutif (Presiden dan lembaga pelaksana), serta yudikatif (Mahkamah Agung dan pengadilan federal), yang bekerja secara seimbang melalui sistem *checks and balances*.
4. Proses pembuatan kebijakan di Amerika Serikat terbagi dalam dua ranah besar, yaitu kebijakan domestik dan ekonomi (seperti kesehatan, pendidikan, dan pajak), serta kebijakan luar negeri (seperti diplomasi, perdagangan internasional, dan keamanan nasional).
5. Seluruh proses politik dan pemerintahan di Amerika Serikat dipengaruhi oleh struktur federal, budaya politik, dan aktor-aktor institusional maupun non-institusional yang berperan dalam sistem demokrasi liberal.

2.4 REFERENSI

Schmidt, S. W., Shelley II, M. C., & Bardes, B. A. (2019). American government and politics today. Cengage Learning.





2.5 Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

(Pilih jawaban yang paling tepat)

1. Sistem pemerintahan di Amerika Serikat yang berlaku sebelum diadopsinya Konstitusi disebut:
 - a. sistem federal
 - b. sistem unitaris
 - c. sistem konfederasi
2. Alasan para pendiri negara AS memilih sistem federal mencakup semua hal berikut, kecuali:
 - a. tidak ada sistem lain yang secara politik dapat diterima
 - b. Amerika Serikat sangat luas secara geografis sehingga sulit untuk diperintah hanya dari ibu kota nasional
 - c. ketiga belas negara bagian secara geografis saling berdekatan, sehingga sistem federal dianggap sesuai
3. Ketika kita mengatakan bahwa pemerintah negara bagian di AS memiliki kekuasaan kepolisian (*police powers*), artinya:
 - a. mereka memiliki wewenang untuk membuat undang-undang demi kesehatan, moralitas, keamanan, dan kesejahteraan rakyatnya
 - b. mereka memiliki hak untuk mendirikan lembaga penegak hukum
 - c. mereka memiliki hak untuk mengecualikan diri dari hukum nasional tertentu
4. Sejak tahun 1925, Mahkamah Agung Amerika Serikat, melalui klausul *due process* (proses hukum yang adil) dalam Amandemen Keempat Belas, secara bertahap memperluas perlindungan *Bill of Rights* agar berlaku juga bagi pemerintah negara bagian dengan menggunakan:
 - a. teori *inkorporasi* (*incorporation theory*)
 - b. klausul pendirian agama (*establishment clause*)
 - c. prinsip supremasi (*supremacy principle*)
5. Baru pada abad ini, pemerintah negara bagian di AS diwajibkan untuk menghormati hak:
 - a. untuk mengajukan *writ of habeas corpus*





- b. atas privasi (*privacy*)
 - c. untuk memiliki dan membawa senjata (*to bear arms*)

6. Mahkamah Agung di AS menyatakan bahwa setiap undang-undang yang melarang pengajaran teori evolusi:
 - a. melanggar *establishment clause* karena memaksakan kepercayaan agama kepada siswa
 - b. melanggar *free exercise clause* dari Amandemen Pertama karena melarang keyakinan orang beragama
 - c. melanggar baik *establishment clause* maupun *free exercise clause*

7. Ideologi populer di Amerika Serikat meliputi:
 - a. konservatisme, liberalisme, dan libertarianisme.
 - b. konservatisme, liberalisme, dan Islamisme.
 - c. konservatisme, liberalisme, dan populisme.

8. Cara terbaik untuk mendefinisikan opini publik adalah:
 - a. keyakinan yang dimiliki oleh pemilih moderat
 - b. keyakinan yang sama-sama dimiliki oleh Demokrat dan Republik
 - c. kumpulan keyakinan individu yang dimiliki oleh sebagian orang dewasa

9. Sebuah partai politik di Amerika Serikat terdiri atas:
 - a. partai di kalangan pemilih, organisasi partai, dan anggota partai
 - b. organisasi partai, partai dalam pemerintahan, dan partai di kalangan pemilih
 - c. partai dalam pemerintahan, partai di kalangan pemilih, dan pelobi (*lobbyist*) untuk partai tersebut

10. Dalam beberapa tahun setelah Konstitusi Amerika Serikat diadopsi, dua partai politik pertama yang terbentuk secara terorganisir adalah:
 - a. Demokrat dan Republik
 - b. Whig dan Demokrat
 - c. Federalis dan Republik





B. Pertanyaan Esai

(Jawab secara singkat dan padat)

1. Beberapa dekade yang lalu, orang-orang dengan gelar pascasarjana di Amerika Serikat cenderung memilih kandidat dari Partai Republik. Namun saat ini, pemilih yang berpendidikan tinggi lebih cenderung mendukung Partai Demokrat. Menurut Anda, mengapa profesi seperti dokter dan pengacara kini lebih banyak mendukung Partai Demokrat? Dan apa alasan yang mungkin menyebabkan dosen atau profesor perguruan tinggi cenderung berpihak pada Partai Demokrat? Jelaskan dengan mengaitkan pada dinamika politik, nilai-nilai profesi, atau kebijakan partai.
2. Sekitar setengah dari pelobi profesional (paid lobbyists) di Washington, D.C., adalah mantan staf pemerintah atau mantan anggota Kongres. Menurut Anda, mengapa kelompok kepentingan (*interest groups*) memilih mempekerjakan orang-orang tersebut? Mengapa beberapa reformis ingin membatasi kemampuan kelompok kepentingan untuk mempekerjakan mereka? Dan dari sisi hukum, atas dasar apa kelompok kepentingan bisa berargumen bahwa pembatasan tersebut bertentangan dengan konstitusi?
3. Apabila Anda hidup di Amerika Serikat saat ini, apakah Anda akan mendukung salah satu dari dua partai politik utama (Demokrat atau Republik)? Jika ya, apakah Anda akan tetap mendukung partai yang sama jika Anda hidup di era pertengahan hingga akhir 1800-an? Jelaskan alasan Anda berdasarkan konteks sejarah dan perubahan nilai-nilai politik masing-masing partai.





AKTIVITAS PEMBELAJARAN 3

3.1 TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengerti apa itu Federalisme, Nasionalisme dan politik orang-orang Pribumi di Kanada.
2. Mahasiswa mengerti Sistem Eksekutif, Parlemen dan Administrasi Publik di Kanada.
3. Mahasiswa mampu menjelaskan Sistem Partai dan Kelompok Kepentingan, Pemilu dan Perilaku Politik di Kanada serta Kebijakan Politik Luar Negeri Kanada.
4. Mahasiswa mampu menganalisis Organisasi dan Struktur Pemerintahan Meksiko.
5. Mahasiswa memahami mengenai Hubungan Dalam Negeri dan Luar Negeri Meksiko.
6. Mahasiswa memahami Pembagian Sistem Pemerintahan di Meksiko.

3.2 URAIAN MATERI

3.2.1 Politik dan Pemerintahan Kanada

Pembahasan mengenai politik dan pemerintahan Kanada diawali dengan pemahaman tentang sistem federalisme, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Kanada dikenal memiliki sistem federal yang unik karena adanya dinamika nasionalisme daerah, terutama di Provinsi Quebec yang memiliki identitas budaya dan bahasa yang berbeda. Selain itu, isu nasionalisme pribumi (Indigenous nationalism) menjadi elemen penting dalam studi politik Kanada, karena masyarakat adat di Kanada terus memperjuangkan pengakuan terhadap kedaulatan wilayah, budaya, dan hak-hak historis mereka.

Materi ini juga membahas struktur pemerintahan Kanada yang menganut sistem monarki konstitusional dengan model parlementer, di mana peran eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri bersama kabinet, sedangkan kepala negara secara simbolik dipegang oleh Gubernur Jenderal sebagai wakil Ratu Inggris. Mahasiswa akan mempelajari fungsi legislatif melalui Parlemen Kanada, yang terdiri dari *House of Commons* (Dewan Rakyat) dan *Senate* (Senat).

Selanjutnya, akan dikaji peran birokrasi dan administrasi publik dalam implementasi kebijakan, serta bagaimana sistem pelayanan publik Kanada menjadi salah satu yang paling transparan dan efisien di dunia.

Topik lain mencakup sistem partai politik dan kelompok kepentingan, di mana mahasiswa akan menganalisis karakteristik partai-partai besar seperti Liberal, Konservatif, NDP, dan Bloc





Québécois, serta pengaruh kelompok kepentingan dan organisasi masyarakat sipil dalam proses politik. Tidak kalah penting, mahasiswa juga akan memahami perilaku pemilih dan sistem pemilu Kanada, termasuk perdebatan mengenai sistem *first-past-the-post*.

Terakhir, materi akan membahas kebijakan luar negeri Kanada, baik dari segi hubungan bilateral (terutama dengan Amerika Serikat) maupun partisipasinya dalam organisasi internasional seperti NATO, PBB, dan Francophonie. Mahasiswa akan diajak merefleksikan bagaimana Kanada membangun citra sebagai negara yang mengedepankan multilateralisme, diplomasi damai, dan keadilan sosial di tingkat global.

3.2.2 Politik dan Pemerintahan Meksiko

Pembahasan mengenai politik dan pemerintahan Meksiko dimulai dari pemahaman tentang sistem pemerintahan republik federal yang menganut model presidensial. Dalam sistem ini, Presiden Meksiko memiliki kewenangan eksekutif yang sangat kuat, dan memegang jabatan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Mahasiswa akan mempelajari struktur lembaga negara seperti Presidensi, Kongres Nasional (Senat dan Dewan Deputi), serta Mahkamah Agung, yang merupakan bagian dari sistem checks and balances di Meksiko.

Selanjutnya akan dikaji pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara bagian, serta peran pemerintah daerah dalam tata kelola publik. Meksiko memiliki tantangan tersendiri dalam mewujudkan desentralisasi yang efektif, terutama dalam konteks ketimpangan ekonomi dan stabilitas politik lokal.

Materi ini juga membahas sejarah politik Meksiko, termasuk dominasi lama Partai Revolusioner Institusional (PRI) dan proses transisi demokrasi yang dimulai pada akhir 1990-an. Mahasiswa akan menganalisis sistem kepartaian modern, persaingan antar partai besar seperti PAN, PRI, dan MORENA, serta dinamika pemilu dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik.

Topik lainnya mencakup hubungan luar negeri Meksiko, terutama dalam konteks kerja sama regional dengan Amerika Serikat dan Kanada dalam kerangka USMCA (pengganti NAFTA), serta tantangan dalam isu seperti perdagangan, migrasi, dan pengendalian narkotika lintas batas.

Mahasiswa juga akan mempelajari hubungan domestik Meksiko, termasuk hubungan sipil-militer, kebijakan keamanan dalam negeri, serta upaya melawan korupsi dan kekerasan kartel. Pembahasan ini memberi pemahaman lebih dalam tentang kompleksitas pemerintahan Meksiko dalam konteks negara berkembang yang berada dalam pengaruh besar kekuatan global dan dinamika kawasan.





Melalui kajian ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang kritis dan komparatif mengenai bagaimana sistem pemerintahan Meksiko dijalankan serta tantangan yang dihadapinya dalam membangun demokrasi yang stabil dan inklusif.

3.3 RANGKUMAN

1. Politik dan Pemerintahan Kanada

- Kanada menganut sistem federalisme dengan model monarki konstitusional dan parlementer.
- Isu nasionalisme daerah (seperti Quebec) dan hak masyarakat *Indigenous* menjadi isu penting.
- Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri dan parlemen dua kamar (*House of Commons dan Senate*).
- Partai politik utama meliputi Liberal, Konservatif, NDP, dan *Bloc Québécois*.
- Kanada aktif dalam diplomasi internasional dan mendukung multilateralisme.

2. Politik dan Pemerintahan Meksiko

- Meksiko adalah republik federal dengan sistem presidensial; Presiden memegang kekuasaan eksekutif utama.
- Proses demokratisasi dan desentralisasi masih menghadapi tantangan.
- Partai politik utama termasuk PRI, PAN, dan MORENA.
- Isu penting: migrasi, perdagangan, kekerasan kartel, dan hubungan luar negeri dalam kerangka USMCA.
- Fokus pada penguatan demokrasi dan penegakan hukum di tengah ketimpangan sosial dan ekonomi.

3.4 REFERENSI

Jackson, R. J., Jackson, D., & Koop, R. (2020). *Canadian government and politics*. Broadview Press.

Tucker, W. P. (1957). *The Mexican government today*. U of Minnesota Press.





3.5 Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

(Pilih jawaban yang paling tepat)

1. Apa bentuk sistem pemerintahan yang dianut oleh Kanada?
 - a. Presidensial absolut
 - b. Monarki absolut
 - c. Monarki konstitusional dan parlementer
 - d. Monarki parlementer tanpa konstitusi
2. Provinsi mana di Kanada yang dikenal dengan dinamika nasionalisme daerah yang kuat?
 - a. Ontario
 - b. Quebec
 - c. Alberta
 - d. British Columbia
3. Siapakah kepala pemerintahan dalam sistem politik Kanada?
 - a. Ratu Inggris
 - b. Gubernur Jenderal
 - c. Perdana Menteri
 - d. Ketua Mahkamah Agung
4. Apa fungsi utama House of Commons dalam sistem parlemen Kanada?
 - a. Mengawasi pengadilan
 - b. Menetapkan kebijakan luar negeri
 - c. Membentuk undang-undang
 - d. Menyusun anggaran monarki
5. Partai politik Bloc Québécois di Kanada dikenal memperjuangkan kepentingan:
 - a. Masyarakat pribumi seluruh Kanada
 - b. Komunitas konservatif
 - c. Wilayah perbatasan
 - d. Provinsi Quebec
6. Sistem pemilu Kanada yang masih diperdebatkan adalah:
 - a. Proportional representation





- b. Preferential voting
 - c. Mixed-member system
 - d. First-past-the-post
7. Apa bentuk sistem pemerintahan Meksiko?
- a. Monarki terpilih
 - b. Federasi parlementer
 - c. Republik federal presidensial
 - d. Uni negara-negara bagian otonom
8. Apa tantangan utama dalam proses desentralisasi di Meksiko?
- a. Kelebihan tenaga kerja
 - b. Ketimpangan ekonomi dan instabilitas lokal
 - c. Integrasi Eropa
 - d. Pembubaran parlemen negara bagian
9. Partai mana yang mendominasi politik Meksiko selama sebagian besar abad ke-20?
- a. MORENA
 - b. PAN
 - c. PRI
 - d. PRD
10. Salah satu isu utama dalam hubungan luar negeri Meksiko adalah:
- a. Pengembangan energi nuklir
 - b. Kerja sama kawasan dalam kerangka USMCA
 - c. Reintegrasi Uni Amerika Latin
 - d. Blok perdagangan Asia Selatan

B. Pertanyaan Esai

(Jawab secara singkat dan padat)

1. Jelaskan bagaimana sistem federalisme di Kanada memengaruhi dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, terutama dalam konteks nasionalisme daerah seperti di Quebec.
2. Bandingkan struktur pemerintahan Kanada dan Meksiko, khususnya perbedaan antara model parlementer dan presidensial.





3. Bagaimana peran masyarakat *Indigenous* di Kanada menjadi bagian dari pembahasan politik nasional, dan sejauh mana perjuangan mereka telah memengaruhi kebijakan publik?
4. Uraikan tantangan yang dihadapi Meksiko dalam mewujudkan sistem desentralisasi yang efektif. Sertakan contoh konkret dari ketimpangan ekonomi atau politik lokal.
5. Mengapa kebijakan luar negeri Kanada cenderung menekankan multilateralisme dan diplomasi damai? Bandingkan dengan pendekatan luar negeri Meksiko, terutama dalam isu migrasi dan perdagangan.





AKTIVITAS PEMBELAJARAN 4

4.1 TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan kemunculan Amerika Serikat dan mandat ekspansionisnya, keterlibatan Amerika Utara dalam konflik neokolonial pada abad ke-20, serta transisi dari NAFTA menuju dinamika regional di abad ke-21
2. Mahasiswa mampu menganalisis dampak politik dan ekonomi dari kebijakan ekspansi Amerika Serikat terhadap negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Amerika Latin.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi peran Kanada dan Meksiko dalam dinamika regional, serta bagaimana posisi mereka berkembang sejak masa pasca-NAFTA hingga era USMCA.
4. Mahasiswa mampu mengevaluasi bentuk-bentuk intervensi Amerika Serikat dalam konflik neokolonial abad ke-20 dan mengaitkannya dengan strategi global AS saat ini.
5. Mahasiswa mampu mengkritisi perkembangan integrasi regional di Amerika Utara dalam konteks perubahan geopolitik global dan munculnya kekuatan-kekuatan baru.

4.2 URAIAN MATERI

4.2.1 Konflik Perbatasan Amerika Utara

Konflik perbatasan di Amerika Utara tidak hanya mencerminkan batas-batas geografis antarnegara, tetapi juga merupakan cerminan dari ketimpangan politik, ekonomi, dan identitas budaya yang telah berlangsung sejak abad ke-19 hingga saat ini. Kemunculan Amerika Serikat sebagai kekuatan hegemonik sejak abad ke-19 dibarengi dengan mandat ekspansionis yang dikenal sebagai *Manifest Destiny*, yaitu keyakinan bahwa AS memiliki hak historis dan moral untuk memperluas wilayahnya hingga ke Pasifik. Pandangan ini memicu sejumlah konflik dan aneksasi wilayah, termasuk Perang Meksiko-AS (1846–1848) yang berujung pada hilangnya hampir separuh wilayah Meksiko, termasuk California dan Texas.

Pada abad ke-20, keterlibatan Amerika Serikat dalam konflik neokolonial semakin kompleks. Melalui pendekatan militer, politik, dan ekonomi, AS campur tangan dalam urusan domestik banyak negara Amerika Latin. Di dalam negeri, isu-isu perbatasan tetap menjadi sumber ketegangan, terutama dalam konteks imigrasi ilegal, pengendalian narkotika, dan perdagangan manusia di perbatasan selatan AS dengan Meksiko. Dinding perbatasan fisik dan kebijakan keras imigrasi yang diterapkan pada masa pemerintahan Trump merupakan manifestasi modern dari ketegangan perbatasan yang telah berakar sejak lama.





Konflik perbatasan juga berkaitan dengan masyarakat Indigenous yang wilayah adatnya terbelah oleh garis negara modern. Baik di Kanada maupun di AS, perbatasan negara sering kali tidak mencerminkan batas budaya atau komunitas tradisional. Hal ini menciptakan tantangan hukum dan sosial terkait hak mobilitas, pengakuan tanah, dan perlindungan identitas budaya. Dalam konteks ini, perbatasan bukan hanya sebagai zona keamanan atau ekonomi, tetapi juga sebagai simbol eksklusivitas dan ketidaksetaraan historis.

Dengan menggunakan bacaan seperti karya French & Manzanarez (2017), mahasiswa diajak untuk tidak hanya memahami konflik perbatasan sebagai isu teknis atau administratif, melainkan juga sebagai persoalan etika, politik ras, dan hak asasi manusia, yang terus berkembang dalam lanskap geopolitik regional dan global.

4.2.2 Pemerintahan Regionalisme Kawasan Amerika Utara

Konsep regionalisme di kawasan Amerika Utara mengalami transformasi dari sekadar integrasi ekonomi menjadi arena yang kompleks dalam hal kerja sama lintas negara, koordinasi kebijakan, dan diplomasi regional. Dimulai dari pembentukan *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) pada tahun 1994, ketiga negara—Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko—menandatangani perjanjian dagang yang menciptakan salah satu blok perdagangan terbesar di dunia. NAFTA membuka arus barang, jasa, dan investasi lintas batas, namun juga menimbulkan kritik atas ketimpangan hasil antara negara dan kelompok sosial tertentu.

Dalam praktiknya, NAFTA tidak mengarah pada pembentukan struktur pemerintahan supranasional seperti Uni Eropa. Sebaliknya, regionalisme di Amerika Utara bersifat pragmatis dan berbasis *soft law*, yang artinya koordinasi lebih sering dilakukan melalui kesepakatan informal, pertemuan bilateral/trilateral, dan jejaring institusional *ad hoc*. Karena tidak adanya badan pengambil keputusan bersama yang permanen, maka kerja sama sering kali bergantung pada kondisi politik domestik masing-masing negara.

Perubahan besar terjadi ketika pemerintahan Donald Trump menegosiasikan ulang NAFTA, yang berujung pada perjanjian baru: *United States-Mexico-Canada Agreement* (USMCA), yang mulai berlaku pada Juli 2020. USMCA memperbarui aturan-aturan utama perdagangan, termasuk perlindungan kekayaan intelektual, upah buruh, dan pengaturan digital economy. Perjanjian ini mencerminkan dinamika baru regionalisme yang lebih menyesuaikan dengan tekanan global seperti nasionalisme ekonomi, proteksionisme, dan tantangan teknologi digital.





Di tengah keterbatasan institusional, muncul pula bentuk-bentuk regionalisme sektoral, misalnya kerja sama dalam isu perubahan iklim, manajemen hutan dan sumber daya alam lintas batas, hingga krisis kesehatan (COVID-19). Pemerintahan regional di kawasan ini bukanlah dalam bentuk kelembagaan yang formal, melainkan melalui pendekatan *multilevel governance*, yang melibatkan negara bagian, kota, komunitas adat, dan sektor swasta dalam dialog dan pelaksanaan kebijakan regional.

Mahasiswa diharapkan dapat mengkritisi bagaimana regionalisme di Amerika Utara mencerminkan asimetri kekuasaan, dominasi kebijakan oleh Amerika Serikat, serta peluang dan hambatan dalam membangun koordinasi regional yang lebih adil dan berkelanjutan.

4.3 RANGKUMAN

1. Ekspansionisme Amerika Serikat membentuk dasar konflik perbatasan historis dan modern, termasuk aneksasi wilayah Meksiko dan pembangunan tembok perbatasan.
2. Konflik perbatasan di Amerika Utara mencakup isu imigrasi, perdagangan ilegal, dan ketimpangan terhadap masyarakat pribumi yang wilayah adatnya terpecah.
3. NAFTA dan USMCA merupakan tonggak utama dalam regionalisme ekonomi Amerika Utara, namun keduanya menimbulkan perdebatan terkait ketimpangan dan kedaulatan nasional.
4. Pemerintahan regional di kawasan ini bersifat informal dan fleksibel, tanpa lembaga supranasional, dengan koordinasi yang bergantung pada dinamika politik domestik.
5. Isu lintas negara seperti perubahan iklim, keamanan kesehatan, dan perdagangan digital mendorong kerja sama sektoral yang menuntut pendekatan *multilevel governance*.

4.4 REFERENSI

French, L. A., & Manzanarez, M. (2017). North American Border Conflicts: Race, Politics, and Ethics.





4.5 Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

(Pilih jawaban yang paling tepat)

1. Apa yang dimaksud dengan *Manifest Destiny* dalam konteks sejarah Amerika Serikat?
 - a. Hak prerogatif Inggris atas wilayah AS
 - b. Keyakinan bahwa AS ditakdirkan memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia
 - c. Keyakinan bahwa AS berhak memperluas wilayahnya hingga ke Pasifik
 - d. Doktrin pertahanan wilayah selatan AS
2. Konflik perbatasan antara AS dan Meksiko saat ini paling sering dikaitkan dengan isu berikut, kecuali:
 - a. Imigrasi ilegal
 - b. Perdagangan manusia
 - c. Sengketa wilayah laut
 - d. Pengendalian narkotika
3. Perjanjian yang menggantikan NAFTA dan berlaku mulai tahun 2020 adalah:
 - a. USNAC
 - b. NAFTA 2.0
 - c. USMCA
 - d. CAMUS
4. Ciri utama regionalisme di Amerika Utara adalah:
 - a. Adanya parlemen regional supranasional
 - b. Integrasi budaya secara menyeluruh
 - c. Pendekatan informal dan berbasis kesepakatan ad hoc (*soft law*)
 - d. Sistem mata uang tunggal
5. Tantangan yang dihadapi masyarakat pribumi terkait perbatasan negara modern adalah:
 - a. Penolakan terhadap penggunaan bahasa lokal
 - b. Keterbatasan mobilitas dan hak atas wilayah adat
 - c. Kewajiban menjadi warga negara ganda
 - d. Penghapusan status kewarganegaraan





B. Pertanyaan Esai

(Jawab secara singkat dan padat)

1. Jelaskan bagaimana konflik perbatasan antara Amerika Serikat dan Meksiko mencerminkan ketimpangan ekonomi dan sosial di kawasan Amerika Utara.
2. Bandingkan tujuan awal pembentukan NAFTA dengan dampak nyata yang dirasakan oleh Meksiko, Kanada, dan AS.
3. Analisis bagaimana sistem *multilevel governance* bekerja dalam konteks kerja sama regional di Amerika Utara tanpa lembaga supranasional formal.
4. Diskusikan dampak ekspansionisme historis Amerika Serikat terhadap hubungan regional dan persepsi negara tetangga hingga hari ini.
5. Bagaimana bentuk kerja sama sektoral di era USMCA dapat menjawab tantangan lintas negara seperti perubahan iklim dan krisis kesehatan?





AKTIVITAS PEMBELAJARAN 5

5.1 TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu menjelaskan Pemerintahan Regional Pasca NAFTA di Kawasan Amerika Utara.
2. Mahasiswa mampu menjelaskan tata kelola keamanan perbatasan di Amerika Utara, membandingkan dinamika keamanan teritorial dan regionalisme antara Amerika Utara dan Eropa. Mahasiswa mampu menganalisis bagaimana pemerintah merancang arsitektur sistem arbitrase perdagangan dan investasi yang terfragmentasi di Amerika Utara
3. Mahasiswa mampu mengevaluasi perbedaan pendekatan kelembagaan antara NAFTA dan USMCA dalam membentuk tata kelola regional.
4. Mahasiswa mampu mengidentifikasi aktor-aktor utama dalam pemerintahan regional pasca-NAFTA, termasuk peran negara bagian, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil.
5. Mahasiswa mampu menilai tantangan dan peluang integrasi kebijakan lintas sektor (perdagangan, lingkungan, tenaga kerja) dalam konteks kerja sama regional yang tidak berbasis institusi supranasional.

5.2 URAIAN MATERI

5.2.1 Pemerintahan Regional Pasca NAFTA di Kawasan Amerika Utara

Pertemuan ini membahas bagaimana dinamika pemerintahan regional di kawasan Amerika Utara mengalami transformasi signifikan setelah berakhirnya *North American Free Trade Agreement* (NAFTA) dan diberlakukannya *United States-Mexico-Canada Agreement* (USMCA) pada tahun 2020. Perubahan ini tidak hanya mencerminkan pergeseran dalam kebijakan perdagangan, tetapi juga mencerminkan pendekatan baru terhadap tata kelola regional yang lebih bersifat sektoral, fleksibel, dan terdesentralisasi. Tidak seperti Uni Eropa yang mengadopsi pendekatan kelembagaan yang kuat dan bersifat supranasional, pemerintahan regional di Amerika Utara tetap berakar pada kedaulatan nasional masing-masing negara, dengan penekanan pada kesepakatan bilateral atau trilateral yang bersifat pragmatis.





Salah satu fokus utama dalam konteks pasca-NAFTA adalah tata kelola keamanan perbatasan. Sejak peristiwa 9/11, keamanan menjadi isu utama dalam agenda regional, terutama antara Amerika Serikat dan Meksiko. Kerja sama dalam bentuk inisiatif seperti *Beyond the Border* (AS-Kanada) dan *21st Century Border Initiative* (AS-Meksiko) menunjukkan bahwa kebijakan keamanan kini mencakup aspek yang lebih kompleks, termasuk isu migrasi, perdagangan manusia, lalu lintas barang dan jasa, serta ancaman lintas negara. Meski ketiga negara memiliki kepentingan berbeda, terdapat upaya harmonisasi kebijakan melalui mekanisme koordinasi yang bersifat teknokratik, namun tanpa lembaga keamanan regional yang permanen.

Selain keamanan, topik penting lainnya adalah perbandingan dinamika regionalisme antara Amerika Utara dan Eropa. Kawasan Eropa, dengan institusi seperti Uni Eropa, Parlemen Eropa, dan Mahkamah Eropa, mengadopsi model regionalisme yang bersifat terlembagakan dan mengikat secara hukum. Sebaliknya, Amerika Utara memilih jalur *soft institutionalism*, di mana pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan konsensus dan negosiasi tanpa otoritas supranasional. Hal ini berdampak pada efektivitas dalam penegakan kebijakan regional dan menimbulkan tantangan dalam menyatukan standar dan regulasi antarnegara.

Terakhir, materi ini juga mengkaji bagaimana pemerintah di kawasan Amerika Utara merancang sistem arbitrase perdagangan dan investasi pasca-NAFTA. NAFTA sempat menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa yang kontroversial seperti *Chapter 11* (Investor-State Dispute Settlement), yang memberi hak bagi investor asing untuk menggugat negara tuan rumah. Dalam USMCA, mekanisme ini direvisi dan menjadi lebih terbatas, mencerminkan tekanan domestik atas kedaulatan ekonomi dan perlindungan hukum nasional. Namun, sistem arbitrase yang dihasilkan tetap menunjukkan arsitektur yang terfragmentasi, karena tidak seluruh sektor atau jenis investasi tunduk pada mekanisme yang sama. Hal ini memperlihatkan keterbatasan dalam membangun rezim hukum regional yang konsisten dan adil bagi semua pihak.

Melalui topik ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami bahwa pemerintahan regional pasca-NAFTA tidak hanya soal perdagangan bebas, tetapi juga menyangkut isu-isu lintas sektor seperti keamanan, migrasi, regulasi digital, dan investasi internasional. Pemerintahan regional di kawasan ini mencerminkan kompromi antara integrasi dan kedaulatan, serta menuntut





pemahaman yang kritis terhadap bagaimana negara-negara Amerika Utara menavigasi kerja sama dalam konteks geopolitik dan tekanan domestik yang terus berubah.

5.3 RANGKUMAN

1. USMCA menggantikan NAFTA dengan pendekatan regional yang lebih fleksibel dan sektoral, tanpa membentuk institusi supranasional seperti di Eropa.
2. Tata kelola keamanan perbatasan menjadi prioritas utama, terutama antara AS-Meksiko, dengan fokus pada isu migrasi, perdagangan, dan ancaman lintas negara.
3. Regionalisme Amerika Utara bersifat informal, berbeda dari model integrasi Eropa yang terlembaga dan mengikat secara hukum.
4. Sistem arbitrase perdagangan dan investasi pasca-NAFTA bersifat terfragmentasi, dengan pengurangan wewenang mekanisme *investor-state dispute settlement* (ISDS).
5. Pemerintahan regional pasca-NAFTA mencerminkan kompromi antara integrasi ekonomi dan perlindungan kedaulatan nasional, serta menghadirkan tantangan baru dalam koordinasi lintas sektor.

5.4 REFERENSI

Bow, B., & Anderson, G. (2014). *Regional Governance in Post-NAFTA North America*. Taylor & Francis.

5.5 Latihan Soal

A. Pilihan Ganda

(Pilih jawaban yang paling tepat)

1. Apa nama perjanjian yang menggantikan NAFTA pada tahun 2020?
 - a. TPP
 - b. USMCA
 - c. NAFTA II
 - d. CAFTA





2. Ciri utama regionalisme di Amerika Utara setelah NAFTA adalah:
 - a. Integrasi kelembagaan penuh seperti Uni Eropa
 - b. Penghapusan perbatasan nasional
 - c. Pendekatan pragmatis dan kesepakatan informal (*soft institutionalism*)
 - d. Pembentukan badan legislatif regional

3. Salah satu isu utama dalam tata kelola perbatasan AS-Meksiko adalah:
 - a. Penentuan zona waktu bersama
 - b. Isu migrasi dan perdagangan ilegal
 - c. Perebutan sumber daya laut
 - d. Kesepakatan mata uang tunggal

4. Inisiatif keamanan perbatasan antara AS dan Kanada dikenal dengan nama:
 - a. *North Border Accord*
 - b. *Cross-Border Framework*
 - c. *Beyond the Border*
 - d. *Safe North Initiative*

5. Sistem penyelesaian sengketa investasi yang paling banyak dikritik di era NAFTA adalah:
 - a. WTO mechanism
 - b. *Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*
 - c. *Intergovernmental Mediation Board*
 - d. *North American Trade Council*

6. Apa perbedaan utama antara regionalisme di Eropa dan di Amerika Utara?
 - a. Eropa bersifat informal, Amerika Utara formal
 - b. Amerika Utara memiliki parlemen regional, Eropa tidak
 - c. Eropa mengadopsi sistem hukum regional yang mengikat, Amerika Utara tidak
 - d. Amerika Utara menghilangkan batas nasional, Eropa tidak

7. Salah satu kritik terhadap sistem arbitrase NAFTA adalah:
 - a. Tidak melibatkan pengusaha lokal
 - b. Terlalu lambat dalam proses
 - c. Memberi kekuasaan besar pada investor asing untuk menggugat negara
 - d. Tidak mengatur perdagangan barang digital





8. Pendekatan *multilevel governance* dalam regionalisme Amerika Utara berarti:
 - a. Semua keputusan dibuat oleh pemerintah pusat
 - b. Hanya negara bagian yang terlibat dalam kebijakan
 - c. Koordinasi dilakukan oleh banyak aktor, termasuk sektor swasta dan masyarakat sipil
 - d. Kebijakan ditentukan oleh lembaga internasional

9. Apa tujuan utama pembaruan mekanisme arbitrase di USMCA?
 - a. Memberi kekuasaan penuh kepada perusahaan asing
 - b. Menghilangkan perlindungan hukum nasional
 - c. Mengurangi dominasi investor asing dalam sengketa hukum
 - d. Meningkatkan pengaruh WTO

10. Kerja sama lintas negara di Amerika Utara dalam isu perubahan iklim dan kesehatan dilakukan melalui:
 - a. Organisasi supranasional regional
 - b. Parlemen regional
 - c. Pendekatan sektoral dan kerja sama teknokratik
 - d. Militer gabungan kawasan

B. Pertanyaan Esai

(Jawab secara singkat dan padat)

1. Jelaskan bagaimana transisi dari NAFTA ke USMCA mengubah pendekatan pemerintahan regional di kawasan Amerika Utara.
2. Bandingkan pendekatan keamanan perbatasan antara Amerika Utara dan Eropa, terutama dari segi kelembagaan dan integrasi kebijakan.
3. Analisis tantangan yang dihadapi Amerika Utara dalam membangun sistem arbitrase perdagangan dan investasi yang adil dan konsisten.
4. Mengapa pendekatan *soft institutionalism* dipilih oleh negara-negara Amerika Utara dalam mengelola kerja sama regional? Apa kelebihanannya? Apa kelemahannya?
5. Berikan contoh bagaimana aktor non-negara (seperti sektor swasta atau masyarakat sipil) terlibat dalam pemerintahan regional pasca-NAFTA.

